

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pelaksanaan aplikasi *SIAPKE PATI* dalam membantu pengelolaan data kemiskinan ekstrem dan pendistribusian bantuan sosial di Kabupaten Pati belum berjalan secara optimal sebagai instrumen utama kebijakan, karena dalam praktiknya aplikasi tidak terintegrasi dalam proses inti pengelolaan data maupun penyaluran bantuan, melainkan hanya berfungsi sebagai media input dan dokumentasi administratif dari data yang telah diverifikasi di luar sistem. Proses pengelolaan data tetap dilakukan melalui mekanisme konvensional seperti musyawarah desa, verifikasi lapangan, dan koordinasi antar perangkat daerah, sementara pendistribusian bantuan sosial juga tidak sepenuhnya dikendalikan melalui aplikasi karena tidak seluruh realisasi bantuan terdokumentasi secara lengkap. Dalam perspektif B. Guy Peters, kondisi ini menunjukkan adanya *policy failure* karena ketidaktepatan instrumen kebijakan, yang kemudian diperkuat oleh *governance failure* akibat lemahnya regulasi, koordinasi, dan pengawasan implementasi. Selanjutnya, temuan ini juga mencerminkan kondisi *fragmented state* sebagaimana dijelaskan oleh Ronan Paddison, di mana negara tetap hadir dalam penanganan kemiskinan ekstrem, namun kebijakan berjalan secara terpisah dan tidak terintegrasi dengan aplikasi *SIAPKE PATI* sebagai sistem digital. Dengan demikian, aplikasi *SIAPKE PATI* belum mampu berfungsi secara efektif dalam mendukung pengelolaan data dan pendistribusian bantuan sosial, serta tidak

memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan kebijakan pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pati.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa aplikasi *SIAPKE PATI* belum berfungsi optimal sebagai instrumen pengelolaan data dan pendistribusian bantuan sosial, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Pati

Pemerintah Kabupaten Pati perlu memastikan bahwa setiap inovasi kebijakan, khususnya berbasis digital, memiliki dasar regulasi yang jelas dan mengikat, seperti Peraturan Bupati serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terstruktur. Selain itu, pemerintah daerah perlu menyelaraskan pengembangan inovasi dengan kebijakan nasional agar memiliki keberlanjutan dan tidak berhenti akibat perubahan sistem dari pusat.

2. Bagi Bapperida Kabupaten Pati

Sebagai leading sector, Bapperida perlu memperkuat fungsi koordinasi dan pengawasan terhadap seluruh perangkat daerah dalam pemanfaatan sistem pengelolaan data. Selain itu, Bapperida perlu memastikan bahwa sistem yang dikembangkan benar-benar digunakan sebagai alat pengendali intervensi, bukan hanya sebagai media input data, serta meningkatkan konsistensi pemutakhiran data dan integrasi antarinstansi.

3. Bagi Diskominfo Kabupaten Pati

Diskominfo perlu mengembangkan sistem aplikasi yang tidak hanya berfungsi sebagai media pencatatan data, tetapi juga mampu mendukung proses monitoring, evaluasi, dan integrasi kebijakan secara menyeluruh. Selain itu, perlu adanya penguatan sistem keamanan, pengelolaan server, serta pengembangan fitur yang lebih adaptif terhadap kebutuhan pengguna dan arah kebijakan nasional.

4. Bagi Pemerintah Desa

Pemerintah desa perlu meningkatkan akurasi dan objektivitas dalam proses verifikasi dan validasi data melalui musyawarah desa, serta memastikan bahwa data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat. Selain itu, pemerintah desa perlu berperan aktif dalam memperbarui data secara berkala agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih lanjut mengenai efektivitas kebijakan berbasis digital dalam konteks *e-government*, khususnya dengan membandingkan implementasi antar daerah atau mengkaji integrasi sistem daerah dengan sistem nasional. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur tingkat efisiensi dan dampak nyata dari penggunaan aplikasi dalam kebijakan publik.